

TINJAUAN STRUKTURASI DALAM KRISIS LPP TVRI

Rekno Sulandjari *)

Abstrak

Sesungguhnya stasiun TV tertua di Indonesia ini memang mengidap sejumlah problem. Tidak hanya soal kepemimpinan dan kekurangan biaya seperti yang paling sering dikemukakan selama ini, tetapi sungguh suatu kompleksitas masalah yang melilit. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI menghadapi masalah sajian acara yang tidak menarik sehingga ditinggalkan oleh khalayaknya, tampilan dan kualitas program, kekurangan sarana teknis, ketinggalan teknologi, dan lain sebagainya. Menjadi TV pelayanan publik bukan berarti siarannya lalu jadi tak inovatif. Jika dikemas dan diolah secara profesional, sajian TV publik bisa sama memikatnya dengan yang komersial. Hanya orientasinya yang menunjukkan perbedaan. Yang satu memang diniatkan sebagai lahan bisnis mencari untung, sedang yang satu lagi dimaksudkan untuk melayani kebutuhan publik dalam informasi, pencerahan dan pencerdasan. Apabila diamati, kegagalan TVRI dalam melaksanakan misinya atau memenuhi harapan masyarakat, sebenarnya bukanlah disebabkan oleh status yang disandangnya atau hanya persoalan ketidakmampuan manajemen, Direksi, Dewan Pengawas / Komisaris maupun karyawan, melainkan berawal pada tidak terpenuhinya kondisi minimal yang dibutuhkan untuk beroperasi secara penuh dengan status yang disandangnya, seperti modal awal, instrumen hukum yang diterapkan dan unsur pendukung lainnya. Hal tersebut mungkin pula disebabkan oleh kurangnya persiapan atau tidak direncanakan secara cermat dan utuh.

Kata kunci : LPP, pencerahan, ketidakmampuan manajemen

PENDAHULUAN

Konsep strukturasi dalam pendekatan ekonomi politik menawarkan wawasan penting dan kesempatan dalam menyampaikan teori ekonomi politik dengan membangun jembatan ke struktur sosial dan agen manusia. Seperti sebuah hubungan yang disediakan oleh spesialisasi antara ekonomi politik dan geografi, strukturasi menghubungkan ekonomi politik dengan sosiologi.

Strukturisasi LPP TVRI Jawa Tengah yang semula adalah Stasiun Produksi Keliling (SPK) Semarang yang dirintis pada tahun 1970 sebagai TVRI Perwakilan Jawa Tengah yang operasionalnya dibantu TVRI Yogyakarta dan TVRI Pusat Jakarta. lagi menjadi PT TVRI (Persero Pada tanggal 29 Mei 1996 menjadi TVRI

* Dosen Jurusan Hubungan Masyarakat Universitas Pandanaran

Stasiun Semarang dengan status Penyiaran yang diresmikan oleh Presiden Suharto yang selanjutnya moment tersebut diperingati sebagai Hari Jadi TVRI Jawa Tengah. Sedangkan pada tanggal 7 Juni 2000 TVRI Stasiun Jawa Tengah berubah bentuk menjadi Perusahaan Jawatan, kemudian pada 17 April 2002 berubah). Baru kemudian pada 18 Maret 2005 hingga sekarang TVRI merupakan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. dari Yayasan TVRI, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Penerangan, Perusahaan Jawatan (Perjan) sampai Perseroan Terbatas (PT) dan sejak 24 Agustus 2006, TVRI bermigrasi lagi (berubah bentuk) menjadi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) atau Televisi Publik.

Hampir semua bentuk kelembagaan pernah disandang atau mewadahi TVRI. Dari dokumen yang ada, (<http://www.Sinarharapan.co.id/berita/003/15/op101.html>) terlihat bahwa upaya perubahan bentuk TVRI tersebut senantiasa didasari banyak pertimbangan, yang intinya adalah mencari bentuk yang paling sesuai bagi TVRI agar dapat berkiprah secara optimal sebagai lembaga penyiaran televisi dan sekaligus bermanfaat bagi kepentingan bangsa, negara dan masyarakat. Namun sayangnya setiap kali dioperasikan dengan status baru, TVRI tetap saja tidak dapat memenuhi harapan di atas – dan kembali statusnya dipertanyakan - sehingga terjadilah perubahan status kelembagaan TVRI dalam waktu yang relatif pendek, dimana TVRI hanya selama dua tahun berstatus sebagai Perusahaan Jawatan (2001 – 2003) dan dua tahun pula sebagai Persero (2003 – 2006), karena menurut UU no. 32/2002 seharusnya TVRI telah berubah status menjadi Lembaga Penyiaran Publik (TV Publik) pada akhir tahun 2005. Setelah TVRI menjadi Persero situasinya tidak banyak berubah, ada dukungan dari APBN, namun jumlahnya jauh dari memadai, dimana tahun anggaran 2004, 2005 dan 2006, TVRI memperoleh dana APBN antara Rp 200 milyar – 300 milyar per tahun. Adanya dana tersebut tentu sangat membantu, namun tidak cukup untuk membuat TVRI menggeliat atau bangkit. TVRI tetap terpuruk dalam hingar bingar industri televisi di tanah air, apalagi secara internasional (Dilsnof, 2011).

Dalam perubahan yang terakhir ini, TVRI Jawa Tengah sebagai Lembaga Penyiaran Publik terus berupaya melangkah maju bersinergi dengan TVRI Pusat Jakarta untuk mewujudkan sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang

sehat, kontrol dan perekat sosial serta pelestarian budaya bangsa dengan memperhatikan kepentingan publik. Strukturisasi yang terjadi di sini digambarkan sebagai sebuah proses dimana struktur merupakan agen manusia, seperti halnya mereka menyediakan ‘perantara’ dari konstitusi tersebut. Kehidupan sosial terdiri dari konstitusi bersama dari struktur dan agen, secara sederhana masyarakat dan individu saling mempengaruhi satu sama lainnya. Kita diproduksi oleh struktur atas tindakan sosial kita atau agen dari produksi. Giddens menganggap bahwa konsep strukturisasi bukanlah hal baru dalam pemikiran sosial (Vincent Mosco, 2009:186). Ia mengusulkan bahwa kita menganggap struktur sebagai kombinasi antara aturan-aturan yang memaksa dan sumber-sumber daya yang memungkinkan. Salah satu karakteristik penting dari teori yang merupakan keunggulan adalah memberikan perubahan sosial, ditunjukkan di sini sebagai sebuah proses yang ada di mana-mana yang menggambarkan bagaimana struktur diproduksi oleh agen manusia yang bertindak sebagai perantara diantara beberapa struktur ini. Maka dari itu, Bidang Berita merupakan salah satu struktural di TVRI Jawa Tengah akan tetap memberikan pelayanan terbaik bagi publik dengan menyajikan program siaran informasi yang aktual, faktual dan bermutu, sehingga menjadi wahana untuk mendapatkan informasi yang benar.

Namun demikian, hal tersebut di atas lebih banyak terkendala kaitannya dengan kucuran dana operasional khususnya dari pusat. Misalnya pada waktu menjadi Perjan, anehnya TVRI tidak memperoleh dana dari APBN untuk biaya operasional, kecuali untuk gaji karyawan yang pegawai negeri (PNS). Penerimaan dari Iuran Penyiaran tidak ada lagi dan kontribusi dari TV Swasta antara ada dan tidak karena dalam “sengketa”. Sedangkan TVRI harus mengoperasikan dan memelihara 23 Stasiun Penyiaran dan sekitar 400 Satuan Transmisi (Pemancar) serta melaksanakan siaran sekitar 66 jam setiap harinya (TVRI Stasiun Pusat Jakarta 20 jam/hari dan 23 Stasiun daerah sekitar rata-rata 2 jam/hari) dengan karyawan lebih dari 6.000 orang. Dan khususnya di Jawa Tengah sebesar 55 orang pegawai PNS. Keanehan bukan hanya pada tidak tersedianya dana bagi operasional TVRI, tetapi juga yang namanya partisipasi publik juga tidak ada sama sekali, kecuali kritikan dan keluhan, sedangkan yang di butuhkan setiap lembaga penyiaran publik adalah

partisipasi, kontribusi konkrit dan komitmen seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pemikiran sampai tindakan nyata.

Karena filosofi dasar Televisi Publik adalah dari publik, oleh publik dan untuk publik. Sedangkan dengan status Perjan tersebut TVRI juga telah ditetapkan sebagai Lembaga Penyiaran yang menyelenggarakan siaran dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dan filosofi Televisi Publik. Sebagai informasi, TV Swasta hanya memiliki satu Stasiun Penyiaran di Jakarta, melakukan siaran paling banyak 24 jam/hari, karyawan berjumlah dibawah 800 orang dan Satuan Transmisi tidak lebih dari 50 lokasi, dan menghabiskan dana operasional sekitar 500 – 600 milyar rupiah per tahun. Dengan menganalisis dari sisi kelebihan dan kekuatan yang ada pada LPP TVRI demi kemajuan di masa mendatang ditemukan beberapa kekurangan dan kelemahan, diantaranya :

1. Peralatan produksi yang terbatas serta sebagian sudah out of date.
2. Ketertarikan masyarakat terhadap TV Swasta tersebut melemahkan minat pelaku bisnis untuk mempromosikan usahanya atau mensosialisasikan programnya melalui TVRI.
3. Dukungan dana yang kurang komprehensif dari pusat.
4. Sarana transportasi untuk kegiatan produksi banyak yang sudah tua dan tidak layak pakai.
5. Lambannya proses regenerasi.
6. Kurangnya kegiatan pelatihan teknis profesi yang dilaksanakan oleh balai diklat TVRI.
7. Di usianya yang ke-40 tahun kurang membuat TVRI dewasa dari sisi kreativitas hal ini dikarenakan sejak bergantinya Deppen menjadi Kominfo (Kementerian Negara) membuat posisi TVRI terombang ambing tak menentu sehingga sejak 12 tahun yang lalu tak ada regenerasi pegawai.
8. Usia PNS yang ada di LPP ini di atas 45 tahun, sehingga banyak acara yang dikemas kurang produktif, rendah kreativitas, dan kurang inovatif.
9. Banyaknya tenaga-tenaga muda hanya sebagai tenaga honorer atau sistem kontrak sehingga salarynyapun hanya disesuaikan dengan UMR walaupun berpendidikan Sarjana, membuat mereka mencari peluang lain yang lebih menjanjikan di TV Swasta misalnya.

1. PERMASALAHAN

Dari uraian di atas, perlu digarisbawahi bahwa TVRI sebagai TV Publik tentu tidak akan mengikuti TV Swasta baik dalam merencanakan, mengoperasionalkan, mengevaluasi dan maitenancenya, namun pertanyaannya adalah:

- Bagaimana mungkin TVRI dapat melaksanakan perannya sebagai Perusahaan Jawatan apabila tidak didukung dan tidak diberi dana operasional yang diperlukan ?
- Bagaimana mungkin TVRI dapat bersaing merebut minat pemirsa (bukan berebut keuntungan) apabila tidak tersedia dana untuk membuat program yang bagus dan menarik?
- Bagaimana mungkin TVRI dapat bersaing dengan TV Swasta apabila kakinya terikat oleh aturan Perjan dan prinsip-prinsip TV Publik, sedangkan TV Swasta menari-nari di lapangan luas seperti tanpa batas.
- Bagaimana mungkin TVRI dapat menghasilkan gambar yang jernih apabila tidak memiliki dana untuk pemeliharaan peralatan yang banyak jumlah dan jenisnya?
- Bagaimana mungkin TVRI dapat memperoleh hasil penjualan iklan yang cukup untuk menutup kekurangan biaya operasionalnya apabila programnya tidak menarik bagi pemasang iklan?

Pertanyaan di atas diajukan bukan berarti TVRI tidak punya kesempatan untuk dicintai pemirsanya, melainkan sebagai penggugah dalam melihat atau mensikapi TVRI yang mudah-mudahan mencuatkan strategi baru dalam mengelola TVRI lebih lanjut. Sehingga TV Publik memang harus tetap bersaing dengan TV Swasta dalam memperebutkan minat pemirsa. Sesungguhnya stasiun TV tertua di Indonesia ini memang mengidap sejumlah problem. Tidak cuma soal kepemimpinan dan kekurangan biaya seperti yang paling sering dikemukakan selama ini, tetapi sungguh suatu kompleksitas masalah yang melilit. TVRI menghadapi masalah sajian acara yang tidak menarik sehingga ditinggalkan oleh khalayaknya, tampilan dan kualitas program, kekurangan sarana teknis, ketinggalan teknologi, dan lain sebagainya. Permasalahannya adalah bagaimana mengatasi permasalahan kronis

TVRI sebagaimana dimaksud di atas yang sebenarnya juga telah menjadi permasalahan TVRI selama ini (apapun status yang disandangnya)?

METODOLOGI

Dalam kajian strukturalisasi pada LPP TVRI menggunakan metode penelitian kualitatif dengan paradigma interpretatif yang lebih memusatkan perhatiannya kepada ‘tindakan’. Tindakan di sini diartikan sebagai ‘perilaku yang bermakna’, merupakan perilaku yang bertujuan, dan oleh karena itu berorientasi ke masa depan. Tindakan hanya akan bermakna bagi kita sepanjang kita dapat mengerti tujuan dari aktornya, untuk berbagi pengalaman. Sebagian besar dari interaksi keseharian kita bermuara pada pengalaman bersama yang kita alami (Fisip-Undip,2006:14).

Skema interpretatif adalah cara-cara penetapan jenis yang dimasukkan dalam gudang pengetahuan aktor, yang secara refleksif diterapkan dalam melakukan komunikasi. Gudang pengetahuan yang digunakan agen-agen dalam memproduksi dan mereproduksi interaksi sama dengan pengetahuan yang mereka gunakan dalam membuat cerita, memberikan alasan dan sebagainya. Komunikasi makna, bersama seluruh aspek kontekstualitas tindakan, tidak harus sekedar dipandang sebagai kajian dalam ruang dan waktu. Dari hasil wawancara secara intensif dengan Pimpinan Produksi Berita TVRI Jateng Dilsnof, SSos, MAP diketahui bahwa dari sekian kekurangan TVRI dalam hal penyiaran informasi dan berita masih terdapat secuil kelebihan. Di antaranya yaitu dalam setiap pemberitaan yang bersifat kekerasan, kekejaman, kecelakaan dan sebagainya, selalu hanya mengutamakan sisi konten berita dan bukan mem*publish* gambar-gambar yang berdarah-darah, seperti halnya yang secara berlomba-lomba dilakukan oleh televisi swasta yang lainnya.

Hal ini dimaksudkan agar *audience* masih tetap terpelihara sisi manusiawi dan emosi serta nuraninya. Sehingga diharapkan jikalau terjadi sebuah ketimpangan atau kejahatan dan kecelakaan di sekitar kita masih mau menolong dan mengupayakan bantuan secara maksimal kepada korban yang bersangkutan. Lain halnya jika seseorang sudah terbiasa melihat adegan kekejaman, kengerian, kecelakaan yang dipublish di media elektronik dan biasanya dilakukan oleh TV swasta berbasis profit kapitalis. Dengan penayangan yang tanpa *diblur*, diyakini

akan menumpulkan nurani *audience* di masa mendatang ketika menghadapi permasalahan yang sama.

Dalam kaitannya dengan teori, peneliti yang berpegang pada paradigma normatif mencoba menemukan teori umum tentang perilaku manusia dan menerapkannya dengan menggunakan metodologi yang dipilih yang didasarkan pada realitas sosial bisa kelompok yang berasal di luar aktor yang muncul dalam masyarakat, lembaga ataupun organisasi. Peran dari teori adalah untuk mengetahui bagaimana realitas terjalin dalam bentuknya atau bagaimana kemungkinannya untuk diubah sehingga lebih efektif. Dengan tujuan menghasilkan suatu pemahaman rasional yang komprehensif, suatu teori umum, untuk mengerti arti dari perilaku sosial dan manusia itu sendiri.

PEMBAHASAN

Jika dicermati lebih mendalam, di antara problem terberat di tubuh stasiun TV tertua di Indonesia ini justru menyangkut sumber daya manusianya. Sebenarnya jika ditelusuri ke belakang, problem TVRI ini dari dulu telah menggejala, namun tidak pernah dipecahkan secara tuntas. Penyelesaian yang dilakukan hanya bersifat sebagian atau sementara, sedang solusi yang menyeluruh dapat dikatakan belum pernah dilakukan. Akibatnya, seperti sekedar meredam persoalan untuk sejenak, dan ketika tiba saatnya akan muncul ke permukaan.

Setelah berpuluh tahun terbiasa dan terbentuk dalam suatu lingkungan kerja yang "enak", memang sukar untuk mengharapkan mereka dapat berubah. Begitu berat "penyakit" yang mengepungnya, sehingga andaikanpun ditukar pimpinan berapa kali, dan diberikan dana berapa pun besarnya, masalah TVRI tidak akan selesai jika penanganannya masih dengan pendekatan yang sama. Bagaimanapun, krisis yang menimpa TVRI ini dapat membawa implikasi yang cukup berarti bagi citra penyiaran publik di tanah air. Menguaknya masalah ini, di saat sistem penyiaran di tanah air sedang menanti bagaimana tampilan suatu TV publik yang bahkan telah dilegitimasi dengan undang-undang, dikuatirkan dapat menyebabkan khalayak menjadi kurang respek dan berpandangan negatif terhadap konsep penyiaran publik. Padahal untuk dapat tampil dengan citra yang positif, tentulah pada dirinya sendiri harus bebas dari segala problem yang mengganggu.

4.1. Teori Strukturalisasi

Teori strukturalisasi dipelopori oleh Anthony Giddens, seorang sosiolog Inggris yang mengembangkan apa yang disebutnya sebagai sosiologi sehari-hari. Sosiologi didasarkan pada pemahamannya atas strukturalisasi dalam sistem sosial. Teori ini ditawarkan dalam rangka membahas pertanyaan-pertanyaan seperti apakah agen manusia sebagai pelaku atau kekuatan sosial yang besar yang membentuk masyarakat. Teori strukturalisasi menunjukkan bahwa agen manusia secara kontinyu mereproduksi struktur sosial artinya individu dapat melakukan perubahan atas struktur sosial. Dalam teori strukturalisasi memungkinkan bergabungnya beberapa proses komodifikasi dan spesialisasi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi politik komunikasi. Keseimbangan strukturalisasi memiliki kecenderungan analisis ekonomi politik struktur di masa mendatang, berjenis institusi bisnis dan pemerintahan, yang bertujuan memasukkan ide-ide dari agen, hubungan sosial, proses sosial dan praktik sosial. Dan demikian pula sebaliknya. Sehingga dualitas struktur bisa diartikan sebagai peran agen sekaligus sebagai masyarakat secara holistik terus-menerus mempengaruhinya dalam kehidupan sosial sehari-hari. Saling bersinerginya agen satu dengan yang lain dimana salah satu dapat menganalisis agen yang tak hadir dalam struktur.

Teori strukturalisasi merupakan teori yang menepis dualisme (pertentangan) dan mencoba mencari linkage/pertautan setelah terjadi pertentangan tajam antara struktur fungsional dengan konstruksionisme-fenomenologis. Giddens tidak puas dengan teori pandangan yang dikemukakan oleh struktural-fungsional, yang menurutnya terjebak pada pandangan naturalistik. Pandangan naturalistik mereduksi aktor dalam struktur, kemudian sejarah dipandang secara mekanis, dan bukan suatu produk kontingensi dari aktivitas agen. Tetapi Giddens juga tidak sependapat dengan konstruksionisme-fenomenologis, yang baginya disebut sebagai berakhir pada imperialisme subjek. Oleh karenanya ia ingin mengakiri klaim-klaim keduanya dengan cara mempertemukan kedua aliran tersebut. Giddens menyelesaikan debat antara dua teori yang menyatakan atau berpegang bahwa tindakan manusia disebabkan oleh dorongan 'eksternal' dengan mereka yang menganjurkan tentang

tujuan dari tindakan manusia. Menurut Giddens, struktur bukan bersifat eksternal bagi individu-individu melainkan dalam pengertian tertentu lebih bersifat 'internal'.

Struktur tidak disamakan dengan kekangan (constraint) namun selalu mengekang (constraining) dan membebaskan (enabling). Hal ini tidak mencegah sifat-sifat struktur sistem sosial untuk melebar masuk kedalam ruang dan waktu di luar kendali aktor-aktor individu, dan tidak ada kompromi terhadap kemungkinan bahwa teori-teori sistem sosial para aktor yang dibantu ditetapkan kembali dalam aktivitas-aktivitasnya bisa merealisasikan sistem-sistem itu. Manusia melakukan tindakan secara sengaja untuk menyelesaikan tujuan-tujuannya, pada saat yang sama, tindakan manusia memiliki "unintended consequences" (konsekuensi yang tidak disengaja) dari penetapan struktur yang berdampak pada tindakan manusia selanjutnya. Bagi khalayak televisi di Jawa Tengah khususnya dengan sajian variatif dari beberapa TV lokal komersial, atau tersedianya lebih dari pilihan tontonan 10 stasiun televisi swasta siaran komersial nasional saat ini. Bahkan barangkali kini sudah agak sukar bagi audiens untuk membagi perhatian mereka menghadapi pilihan yang begitu banyak.

Bukan mustahil pula pada titik tertentu kelak akan terjadi kejenuhan di sisi khalayak, jika yang disajikan oleh sekian stasiun TV tidak adanya varian, dan hanya demi mengejar target keuntungan materi yang berlimpah hanya mengubah sedikit sajian siarannya di bagian-bagian tertentu yang diminati pemirsanya. Sedangkan yang dibutuhkan khalayak adalah siaran televisi yang berbeda dari beragam sajian komersial yang selama ini telah ada, yaitu siaran yang isinya mendidik sekaligus menghibur. Di tengah ramainya suguhan televisi dewasa ini yang sebenarnya nyaris sama dalam gaya dan semangatnya, dibutuhkan suatu penyeimbang. Harus ada suatu sajian siaran televisi yang tampil beda. Di tengah meriahnya operasional televisi swasta yang mencari keuntungan dari penyiaran iklan yang hampir tiada batasnya tersebut, khalayak perlu mempunyai pilihan lain.

Pilihan itu adalah suatu siaran televisi yang tidak mengutamakan perolehan laba. Artinya bukan semata-mata bersifat komersial. Meski berupaya mencari dana, namun tidak menjadikannya sebagai basis pertimbangan untuk segalanya. Dengan demikian ada pilihan bagi khalayak untuk menikmati sajian siaran televisi yang tidak sebentar-sebentar diinterupsi oleh penayangan iklan. Sebuah siaran yang lebih

ditujukan untuk mencerdaskan khalayak, bukan sekedar menghibur mereka. Fungsi menghibur ini toh sudah dikerjakan oleh TV swasta, yang disana-sini malah sudah berlebih.

Di Inggris kita ketahui ada televisi BBC dan di Jepang ada NHK yang merupakan televisi publik yang berbobot dan berorientasi non-komersial. Keduanya mempunyai misi mencerdaskan khalayaknya. Bukan siaran TV yang sekedar sebagai ajang bisnis untuk mengejar sebanyak-banyak iklan untuk dijejalkan ke dalam tayangannya. Peran sebagai suatu penyiaran publik non-komersial inilah yang harus diemban oleh TVRI dengan sebaik-baiknya. Lagipula, sebagai aset pemerintah dan masyarakat, yang telah puluhan tahun dibiayai oleh negara, memang sepatutnya TVRI menjalankan fungsi ini. Jika tidak, siapa yang harus mengambil alih peran ini ? Menjadi TV pelayanan publik bukan berarti siarannya kemudian menjadi tak berisi dan miskin akan kualitas. Jika dikemas dan diolah secara profesional, sajian TV publik memiliki kemampuan yang sama memikatnya dengan TV yang komersial dengan orientasi yang berbeda tentunya. Di satu sisi memang ditujukan sebagai lahan bisnis dalam mencari keuntungan, sedangkan di sisi yang lainnya dimaksudkan untuk melayani kebutuhan publik dalam informasi, pencerahan dan pencerdasan.

Struktur merupakan usaha konseptual yang sangat berat, sifat struktur sistem sosial sampai kini hanya ada sebagai bentuk perilaku sosial yang secara terus menerus diproduksi dengan waktu dan ruang. Sentralitas waktu dan ruang diajukan untuk memecah kebuntuan dualisme statis/dinamik, sinkroni/diakroni, atau stabilitas/perubahan. Dualisme seperti ini terjadi karena waktu dan ruang biasanya diperlakukan sebagai panggung atau konteks bagi tindakan. Waktu dan ruang merupakan unsur yang konstitutif bagi tindakan. Artinya, tidak ada tindakan tanpa waktu dan ruang. Karena itu, tidak ada waktu yang terus-menerus statistik dan selalu dinamik.

Dualitas Struktur dan sentralitas waktu dan ruang menjadi poros terbentuknya teori strukturasi dan berperan dalam menafsirkan kembali fenomena-fenomena modern, seperti negara-negara, globalisasi, ideologi, dan identitas. Teori strukturasi menunjukkan bahwa agen manusia secara kontinyu mereproduksi struktur sosial – artinya individu dapat melakukan perubahan atas struktur sosial.

Aspek-aspek dalam teori strukturasi dapat dipahami dengan mengenali perbedaan antara konsep 'struktur' dengan 'sistem'. Struktur adalah sebagai seperangkat aturan dan sumber daya atau seperangkat hubungan transformasi yang diorganisasikan secara rekursif sebagai sifat-sifat sistem sosial, berada di luar ruang dan waktu, disimpan dalam koordinasi dan kesegarannya sebagai jejak-jejak memori dan ditandai oleh 'ketiadaan subjek'.

Sistem adalah hubungan yang direproduksi antara aktor atau kolektivitas yang diorganisasikan sebagai praktek sosial regular atau sistem adalah tempat disirkulkannya secara rekursif struktur yang terdiri dari aktivitas-aktivitas agen manusia dalam situasi tertentu, yang direproduksi dalam ruang dan waktu. Strukturasi adalah kondisi yang menentukan kesinambungan atau transmudasi struktur dan dengan demikian reproduksi sistem sosial atau penataan relasi-relasi sosial lintas ruang dan waktu berdasarkan dualitas struktur.

Terkait dengan krisis di tubuh LPP TVRI di Jawa Tengah khususnya, untuk itu mutlak diperlukan langkah-langkah perubahan yang signifikan bagi *positioning*, tampilan dan kinerja stasiun TV ini dalam melayani masyarakat. Sebagai contoh, rasanya hingga kini belum ada suatu penjelasan yang menyeluruh kepada publik, mengenai bagaimanakah gerangan konsepsi TVRI sebagai sebuah stasiun yang berbeda dari sejumlah televisi lain yang semuanya merupakan bisnis komersial. Tanpa suatu gambaran yang konkret mengenai arah haluan TVRI, wajar bila timbul pertanyaan, "Apakah TVRI mau tetap seperti dulu, melanjutkan riwayat hidup yang telah dilakoninya sekitar 40 tahun?". Ataupun telah ada kesadaran untuk dengan sengaja mengubah diri seiring dengan berubahnya zaman?. Stasiun LPP TVRI bermisi utama melayani publik, karena itu tidak komersial, atau BUMN yang cari untung, atau memang akan bertujuan menjadi TV komersial?.

Kejelasan mengenai hal ini amat penting karena akan menentukan bagaimana "rute perjalanan" TVRI dalam mengfungsikan keberadaannya di tengah percaturan medan penyiaran. Mengkaji strukturasi sistem sosial berarti mengkaji mode-mode tempat diproduksi dan direproduksinya sistem-sistem seperti itu dalam interaksi, yang didasarkan pada aktivitas-aktivitas utama aktor-aktor (pelakon) ditempat tertentu yang menggunakan aturan-aturan dan sumber daya-sumber daya dalam konteks tindakan yang beraneka ragam dan juga kreatif.

4.2. Dualitas Struktural

Gagasan dualitas (timbang-balik) antara pelaku dan struktur diajukan untuk menepis konsep dualisme (pertentangan). Seperti yang telah disinggung di atas, sentralitas waktu dan ruang, bersama dualitas pelaku dan struktur menjadi dua tema sentral yang menjadi poros teori strukturasi. Dualitas berarti tindakan dan struktur saling mengandaikan. Dualitas struktur adalah struktur sebagai media dan hasil perilaku yang diorganisasikannya secara rekursif. Sifat-sifat struktural sistem sosial tidak ada di luar tindakan namun secara terus-menerus terlibat dalam produksi dan reproduksi.

Perjumpaan diatur oleh mekanisme-mekanisme dualitas pelaku dan struktur. Sedangkan perjumpaan itu sendiri terjadi karena adanya konvergensi ruang dan waktu. Dalam hal ini, mobilitas ruang dan waktu merupakan poros eksistensi masyarakat. Konteks aktor dan struktur sosial menunjukkan titik tolak hubungan dalam kesadaran subjek yang bersifat intensional. Kesadaran bukan sesuatu yang tertutup dan terlepas dari subjek-subjek yang disadari, tetapi kesadaran selalu mengarah dan melibatkan objek. Demikian pula tindakan sosial (agency) selalu mengandalkan keterlibatan struktur sosial.

Tindakan sosial tidak pernah terlepas dari struktur sosial. Struktur dalam konteks tindakan sosial berperan sebagai sarana (medium) dan sumber daya (resources) bagi tindakan sosial yang kemudian membentuk sistem dan intitusi sosial. Dengan demikian, membenahi TVRI berarti harus melakukan perubahan yang menyeluruh. Bila diibaratkan mesin, maka untuk memperbaiki TVRI tidak bisa tidak harus di "overhaul", harus "turun mesin". Perbaikan mesti dilakukan sejak merumuskan kembali konsepsi dasar yang menjadi patokan hingga ke rumusan yang mendetail untuk mengoperasionalkan konsep suatu stasiun penyiaran publik. Dualitas struktur merupakan dasar utama kesinambungan dalam reproduksi sosial dalam ruang dan waktu. Pada saatnya hal ini mensyaratkan monitoring reflektif agen-agen dan sebagaimana yang ada dalam aktivitas sosial sehari-hari.

Namun demikian jangkauan pengetahuan manusia terbatas, sehingga tak dapat dipungkiri bahwa arus suatu tindakan senantiasa menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak diinginkan oleh agen-agen dan konsekuensi-konsekuensi yang tidak diinginkan itu mungkin juga membentuk kondisi-kondisi tindakan yang

tidak diakui dalam suatu umpan balik. Dalam kajian krisis yang ada di tubuh LPP TVRI khususnya di Jawa Tengah dapat diaplikasikan sebagai berikut :

1. Struktur (LPP TVRI) akan melakukan :
2. Signifikansi (Memberikan pencerahan informasi)
3. Dominasi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi)
4. Legitimasi (UU UU no. 32/2002 seharusnya TVRI telah berubah status menjadi Lembaga Penyiaran Publik (TV Publik) pada akhir tahun 2005.)
5. Modalitas (Pemerintah dengan catatan terdapat kepastian berada di bawah kewenangan departemen mana)
6. Skema (Sesuai dengan prosedur peralihan dana operasional)
7. Fasilitas (SDM dan sarana prasarana yang sesuai perkembangan zaman)
8. Norma (tak diperkenankan mencari iklan sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur).

Kategorisasi yang ketiga berkaitan erat dengan personil yang ada di Pusat dan Propinsi yang berkaitan dengan keberaannya sebagai pimpinan dan agen-agen struktur merupakan agen manusia, seperti halnya mereka menyediakan ‘perantara’ dari konstitusi tersebut.

Kehidupan sosial terdiri dari konstitusi bersama dari struktur dan agen, secara sederhana masyarakat dan individu saling mempengaruhi satu sama lainnya. Aktor manusia (dalam hal ini para pegawai di lingkungan LPP TVRI) tidak hanya mampu memonitor aktivitas-aktivitasnya sendiri dan orang lain dalam regularitas perilaku sehari-hari, namun juga mampu ‘memonitor kerja monitoringnya sendiri’ dalam kesadaran diskursif.

4.3. Pandangan Tentang Hakekat Manusia

Teori strukturasi merupakan teori umum dari aksi sosial. Teori ini menyatakan bahwa manusia adalah proses mengambikan dan meniru beragam sistem sosial. Dengan kata lain, tindakan manusia adalah sebuah proses memproduksi dan mereproduksi sistem-sistem sosial yang beraneka ragam. Interaksi antar individu dapat menciptakan struktur yang memiliki *range* dari masyarakat yang lebih besar dan institusi budaya yang lebih kecil yang masuk dalam hubungan individu itu sendiri. Individu yang menjadi komunikator bertindak secara strategis

berdasarkan pada peraturan untuk meraih tujuan mereka dan tanpa sadar menciptakan struktur baru yang mempengaruhi aksi selanjutnya.

Hal ini dikarenakan pada saat individu itu bertindak dalam rangka memenuhi kebutuhannya, tindakan tersebut menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan (*unintended consequences*) yang memapankan suatu struktur sosial dan mempengaruhi tindakan individu itu selanjutnya. Struktur dinyatakan seperti hubungan pengharapan, kelompok peran dan norma-norma, jaringan komunikasi dan institusi sosial dimana keduanya berpengaruh dan dipengaruhi oleh aksi sosial. Struktur memfasilitasi individu dengan aturan yang membimbing tindakan mereka. Akan tetapi, tindakan mereka juga bertujuan untuk menciptakan aturan-aturan baru dan mereproduksi yang lama.

Manusia menurut teori ini yaitu agen pelaku bertujuan yang memiliki alasan-alasan atas aktivitas-aktivitasnya dan kemampuan menguraikan alasan sebuah tindakan secara berulang-ulang. Aktivitas-aktivitas sosial manusia ini bersifat rekursif dengan tujuan agar aktivitas-aktivitas sosial itu tidak dilaksanakan oleh pelaku-pelaku sosial tetapi diciptakan untuk mengekspresikan dirinya sebagai aktor/pelaku secara terus menerus dengan mendayagunakan seluruh sumberdaya yang dimilikinya. Pada dan melalui aktivitas-aktivitasnya, agen-agen mereproduksi kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya aktivitas-aktivitas tersebut. Tindakan manusia diibaratkan sebagai suatu arus perilaku yang terus-menerus seperti kognisi.

Strukturasi mengandung tiga dimensi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemahaman (*interpretation / understanding*)
yaitu menyatakan cara agen memahami sesuatu.
- 2) Moralitas atau arahan yang tepat,
yaitu menyatakan cara atau strategi bagaimana seharusnya sesuatu itu dilakukan.
- 3) Kekuasaan dalam bertindak
yaitu menyatakan cara agen mencapai suatu keinginan.

Tiga dimensi strukturasi ini mempengaruhi tindakan agen. Tindakan agen diperkuat oleh struktur pemahaman, moralitas, dan kekuasaan. Dalam hal ini agen menggunakan aturan-aturan untuk memperkuat tindakannya. Dalam satu kelompok

yang telah terbentuk strukturnya, masing-masing individu saling membicarakan satu topik tertentu. Dalam strukturasi, hal ini tidaklah direncanakan dan merupakan konsekuensi yang tidak diharapkan dari perilaku anggota-anggota kelompok. Norma atau aturan yang ada diinterpretasi oleh tiap individu dan menjadi arahan tingkah laku mereka. Kekuatan yang mereka miliki memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan dan mempengaruhi tindakan orang lain.

Dalam prakteknya, tindakan seseorang dapat dipengaruhi dan mempengaruhi beberapa struktur yang berbeda dalam waktu yang sama. Pertemuan lebih dari satu struktur ini kemungkinan akan menimbulkan:

1. **Mediasi** yaitu struktur yang satu menjadi perantara munculnya struktur yang lain. Dapat dikatakan produksi dari suatu struktur dapat membentuk struktur baru atau melengkapi struktur yang sudah ada.
2. **Kontradiksi** yaitu struktur yang satu mengatasi atau menghapus struktur yang lama. Hal ini disebabkan adanya pertentangan yang memicu konflik antar struktur sehingga menghasilkan perubahan struktur yang berguna untuk mengatasi munculnya konflik yang berkepanjangan ataupun menghapus struktur yang sudah tidak relevan.

Point kedua inilah yang sesuai dengan kondisi LPP TVRI dari Yayasan TVRI, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Penerangan, Perusahaan Jawatan (Perjan) sampai Perseroan Terbatas (PT) dan sejak 24 Agustus 2006, TVRI bermigrasi lagi (berubah bentuk) menjadi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) atau Televisi Publik – yang ditandai Hampir semua bentuk kelembagaan pernah disandang atau mewadahi TVRI, mulai dengan pelantikan Direksi LPP TVRI - berdasarkan UU no. 32 / 2002 tentang Penyiaran. Upaya perubahan bentuk TVRI tersebut senantiasa didasari banyak pertimbangan, yang intinya adalah mencari bentuk yang paling sesuai bagi TVRI agar dapat berkiprah secara optimal sebagai lembaga penyiaran televisi dan sekaligus bermanfaat bagi kepentingan bangsa, negara dan masyarakat. Namun sayangnya setiap kali dioperasikan dengan status baru, TVRI tetap saja tidak dapat memenuhi harapan di atas – dan kembali statusnya dipertanyakan - sehingga terjadilah perubahan status kelembagaan TVRI dalam waktu yang relatif pendek, dimana TVRI hanya selama dua tahun berstatus sebagai Perusahaan Jawatan (2001 – 2003) dan dua tahun pula sebagai Persero (2003 –

2006), karena menurut UU no. 32/2002 seharusnya TVRI telah berubah status menjadi Lembaga Penyiaran Publik (TV Publik) pada akhir tahun 2005.

Apabila diamati, kegagalan TVRI dalam melaksanakan misinya atau memenuhi harapan masyarakat, sebenarnya bukanlah disebabkan oleh status yang disandanginya atau hanya persoalan ketidakmampuan manajemen, Direksi, Dewan Pengawas / Komisaris maupun karyawan, melainkan berawal pada tidak terpenuhinya kondisi minimal yang dibutuhkan untuk beroperasi secara penuh dengan status yang disandanginya, seperti modal awal, instrumen hukum yang diterapkan dan unsur pendukung lainnya. Hal tersebut mungkin pula disebabkan oleh kurangnya persiapan atau tidak direncanakan secara cermat.

4.4. Refleksi Teori Strukturasi

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan TVRI Jawa Tengah saat beraktivitas di lingkungan kerjanya terikat dengan waktu dan ruang serta struktur yang ada di TVRI khususnya di Jawa Tengah. Ia menempatkan dirinya sebagai pegawai yang sedang bekerja menjadi seorang abdi masyarakat/publik. Ia sudah terikat dengan aturan-aturan yang ada di lingkungan PNS di TVRI seperti memakai baju seragam yang sopan, tidak memakai kaos dan memakai sandal, serta datang tepat waktu. Aturan-aturan yang ada itu nanti akan dipahaminya berdasarkan pemahaman yang sudah tercipta dalam dirinya.

Tanpa harus mengulang-ulang dan mengucapkan aturan secara verbal, pegawai tersebut secara otomatis akan menjadikan aturan itu sebagai kebiasaan yang harus dia lakukan. Contoh lebih spesifiknya dalam hal berpakaian. Pegawai itu menganggap bahwa mengikuti kegiatan/aktivitas di lingkungan TVRI merupakan sesuatu hal yang bersifat formal sehingga ia akan mengenakan baju seragam yang sudah ditentukan jenisnya secara sopan, memakai sepatu dan tidak memakai kaos atau tidak mengenakan sandal. Sehingga dengan sendirinya hal tersebut akan menjadi rutinitas dan setiap kali menghadiri kegiatan yang bersifat formal lainnya ia akan mengenakan pakaian yang sama (tidak mengenakan kaos dan sandal). Aturan itu sudah terinternalisasi dalam dirinya, bahkan lama kelamaan akan menjadi suatu rutinitas yang akan dimunculkan setiap hari. Rangkaian tersebut merupakan proses dari strukturasi yang terjadi dalam lingkup ruang dan waktu.

PENUTUP

Kegagalan mengatasi permasalahan utama dan kronis yang dihadapi TVRI sebagai TV Publik akan mengakibatkan semakin terpuruknya citra (*image*) TVRI dan siaran TVRI tidak ditonton masyarakat (sangat sedikit pemirsanya). Apabila hal tersebut terjadi berarti *semua* pengorbanan (biaya, peralatan dan SDM) yang begitu besar menjadi sia-sia dan sekaligus merupakan kerugian besar bagi bangsa dan negara.

Bersamaan dengan itu, bagi pengelola TVRI, kegagalan dimaksud akan dianggap sebagai akibat lemahnya dukungan sehingga mereka tidak dapat berbuat banyak atau lebih dirasakan sebagai akibat Ruang Menari yang Sempit atau ibarat lari karung, sedangkan bagi masyarakat/pemirsa, mungkin TVRI dilihat sebagai sumber kekecewaan dan sasaran kritik. Siapapun yang cinta TVRI tentu berharap bahwa di masa yang akan datang TVRI dapat menjadi TV Publik sebagaimana yang di cita-citakan, maju dan berkembang serta memiliki citra (*image*) yang terhormat sebagai TV publik, kalau bisa menjadi Flag Carrier TV Nasional dan sekaligus sebagai Public Relations (PR) Bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional.

Mengacu pada pengalaman (baca: *kegagalan*) masa lalu sebagaimana diuraikan di atas dan untuk meringankan beban pemerintah, terutama dalam hal pengadaan dana dan fasilitas bagi TVRI serta bahwa kelembagaan dan sistem TV Publik di setiap negara tidaklah sama - tidak harus sama - melainkan disesuaikan dengan kondisi dan situasi setiap negara, maka dengan ini disampaikan saran sebagai berikut :

Perlu dikaji dan ditetapkan sistem atau arsitektur kelembagaan TV Publik secara nasional yang sesuai dan dibutuhkan bangsa Indonesia. Bukan hanya kelembagaan TVRI, melainkan termasuk lembaga pendukungnya, untuk sementara sebut saja sebagai Lembaga Pendukung Penyiaran TV Publik (LP3). Lembaga inilah yang akan bekerja dan mendukung TVRI dalam mengatasi permasalahan TV Publik diatas, misalnya:

1. Mencari cara atau jalan keluar yang fundamental, sistemik dan strategis, memiliki leverage yang besar untuk mengatasi kesulitan keuangan, program, peralatan, kepegawaian maupun hambatan kronis TV Publik pada umumnya.

2. Menemukan cara yang paling tepat dan efektif untuk melibatkan seluruh kelompok dan lapisan masyarakat sebagai perwujudan filosofi dasar TV Publik; dari publik, oleh publik dan untuk publik sehingga status baru TVRI dengan nama lengkap Lembaga Penyiaran Publik TVRI tidak hanya sekedar nama pajangan.
3. Mengajak duduk bersama insan-insan yang berkompeten di bidang penyiaran khususnya dari praktisi dan profesional kependidikan guna merumuskan LPP yang ideal demi keberlangsungan dan ketergantungan khalayak pada LPP dalam menjalin persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara.
4. Pemerintah segera mengambil keputusan agar posisi LPP TVRI ini memiliki kepastian, baik secara *de facto* dan *de jure* berada di bawah kewenangan departemen mana, sehingga operasional dan regenerasinya bisa cepat tertanggulangi. Jangan menunggu hingga masalah yang ada semakin kronis, karena para praktisi di lembaga ini khususnya LPP TVRI Jawa Tengah menunggu dengan penuh harap akhir Mei 2013 terjadi ketetapan yang pemerintah janjikan selama bertahun-tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan.2008.*Konstruksi Sosial Media Massa*.Jakarta: Kencana Prenada
- Downing, John.Moh.Ali.1990.*Questioning The Media: A Critical Introduction*.NeweBurry Park: Sage Publications
- Fisip.2006.*Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang:UNDIP
- Gazali, Effendi dkk.2003.*Konstruksi Sosial Industri Penyiaran*.Jakarta:FISIP UI
- Giddens, A. 1984. *The Constitution of Society-Teori Struktural untuk Analisis Sosial*. Pasuruan: Pedati.
- Mosco, Vincent.(2009).*The Political Economy of Communication*.2nd.edition.Los Angeles: SAGE
- Porter,Michael E.(2007).*Strategi Bersaing*.Tangerang:Karisma Publishing Group